

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan informasi-informasi yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi terkait. Di bawah ini adalah beberapa ringkasan jurnal penelitian sebelumnya.

*Pertama*, penelitian terdahulu berikutnya berjudul “*Gagasan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda*” yang ditulis oleh (Mirza Hardian dkk, 2021) dimana dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa secara konseptual pendidikan politik bagi generasi milenial dalam konteks Indonesia seharusnya menerapkan dua metode, yakni, 1) Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi milenial dalam konteks Indonesia harus meninjau berbagai aspek pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan perilaku dan aspek psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan intelektual dan partisipatif. 2) Muatan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ialah demokrasi, budaya politik Pancasila, dan isu-isu internasional. Kesimpulan dari penelitian bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu upaya yang sistematis dan berkesinambungan. Konsep pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda dalam konteks Indonesia merujuk pada upaya merespon tantangan apatisisme politik generasi muda.

Fokus utama persoalan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai kesamaan yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi warga negara. Hal yang membedakan kedua penelitian ini adalah kebijakan yang ditentukan oleh pihak-pihak terkait.

Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh (Mirza Hardian dkk, 2021) hanya menjelaskan konsep pendidikan politik dalam konteks Indonesia dan tidak terdapat unsur instansi manapun. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan strategi dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh instansi Bakesbangpol.

**Kedua**, penelitian terdahulu berjudul *“Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat AD HOC”* yang di tulis oleh (Asrinaldi & Istikharah, 2019) menjelaskan tentang tingkat pemahaman politik Masyarakat yang rendah. Penyelenggara pemilu otomatis mempunyai pengetahuan politik yang sedikit. Dibandingkan dengan fungsi partai politik yang misinya melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, terbilang masih kurang optimal. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mendorong pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat lokal guna meningkatkan masyarakat agar sadar terhadap politik. Politik bukan sekedar meraih kekuasaan, tapi mengajarkan kita bagaimana membentuk demokrasi dengan baik dan tertib. Selanjutnya, penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus kepada masyarakat sebagai pelaksana pemilu pada tingkatan AD HOC. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang dimana lebih berfokus kepada strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Lumajang.

**Ketiga**, penelitian terdahulu selanjutnya berjudul *“Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia”* yang ditulis oleh (Nurdiansyah, 2015), dimana penelitian ini menjelaskan bahwa upaya reformasi ini memberikan perubahan dalam semua dimensi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis yang bercirikan pemilihan secara langsung, pemimpin pemerintahan yang berskala nasional dan daerah oleh rakyat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diharuskan untuk memahami politik, salah satunya dapat dicapai

melalui pendidikan politik. Akan tetapi kenyataannya saat ini masyarakat Indonesia kurang memperoleh pendidikan politik yang maksimal dan masih kurang pemahaman politiknya dan hanya dijadikan komoditas politik oleh kelompok terkait. Hal demikian memperlihatkan bahwa peran pemerintah dan lembaga politik yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan masih belum optimal. Pendidikan kewarganegaraan yang buruk berarti implementasi demokrasi yang kurang tepat sasaran dan bahkan dapat menimbulkan konflik antar sektoral. Pembahasan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni kedua penelitian ini bersama membahas tentang kebijakan pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan politik, akan tetapi yang membedakan dalam penelitian sebelumnya adalah keterlibatan partai politik yang ikut mengimplementasikan tugasnya terkait pendidikan politik terhadap masyarakat..

**Keempat**, penelitian terdahulu yang berjudul *“Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan”* yang ditulis oleh (Efyanti, 2018), dalam penelitian ini membahas tentang upaya lembaga Kesbangpol Linmas Kota Sungai Penuh dalam menjaga stabilitas politik dalam bidang sosial politik dengan melaksanakan pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang ada. Panduan ini diberikan melalui pelatihan kebijakan sosial dan politik. Berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini membahas terkait peran Kesbangpol Linmas yang mana lebih berfokus kepada pembinaan lembaga sosial politik dan lembaga kemasyarakatan.

**Kelima**, mendukung referensi bacaan selanjutnya peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berjudul *“Pendidikan Politik di Era Disrupsi”*. Penelitian yang dilakukan oleh (Khoiruddin Bashori, 2018) menghasilkan informasi terkait pemahaman tentang perpolitikan dalam masa transisi dan memunculkan perlunya pendidikan politik yang lebih disesuaikan

dengan situasi saat ini, khususnya di era perubahan ini memberikan informasi untuk membantu memahami bagaimana melakukan hal tersebut. ini. Pada dasarnya, di hampir setiap aspek kehidupan, hal-hal yang tidak terduga terjadi. Di tingkat politik, disrupsi mendorong digitalisasi dalam sistem perpolitikan. Hadirnya aplikasi teknologi digital yang inovatif akan merangsang munculnya aplikasi serupa dalam aspek politik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian terdahulu oleh (Khoirudin Bashori, 2018) ini memiliki persamaan dengan penelitian terkait dengan perlunya pendidikan politik, dimana dalam penelitian ini masalah yang terjadi pada era disrupsi pada masa perubahan yang penuh gejolak tidak terduga, mendasar, dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. reformasi baru menggantikan orde lama yang tidak relevan terhadap kebutuhan zaman, dan fokus pada pendidikan politik yang bisa lebih beradaptasi dengan keadaan saat ini.

**Keenam**, penelitian selanjutnya berjudul “*Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan Pendidikan Politik*”, penelitian ini ditulis oleh (Jati 2017). Dalam penelitian ini menjelaskan analisis strategi Partai Golkar Kabupaten Blitar dalam komunikasi politiknya dalam pembinaan perpolitikan guna mengembangkan literasi digital masyarakat dengan menggunakan media sosial serta faktor yang menjadi penghambat bagi parpol tersebut dalam menjalankan strategi politik mereka. Dari hasil kajian diketahui strategi komunikasi politik Partai Golkar daerah Kabupaten Blitar menentukan unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator, pesan, medium, komunikator, dan pengaruh sebagaimana konsep komunikasi dari Harold D. Laswell. Penelitian sebelumnya menemukan hambatan internal dan eksternal dalam menerapkan strategi ini. Hambatan internal mencakup kondisi psikologis generasi muda dan sumber daya yang menjadi pertanggung jawaban calon legislator. Di sisi lain, hambatan eksternal antara lain berita dari media atas sebagian

pernyataan kontroversi elite politik, sehingga menuai berbagai opini publik yang negatif, serta adanya saingan diantara partai-partai politik lainnya. Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis, yakni penelitian terdahulu membahas terkait strategi komunikasi politik melalui media sosial oleh partai Golkar wilayah Kabupaten Blitar dalam mengimplementasikan pendidikan politik, jika dilihat partai Golkar merupakan pelaksana pendidikan politik dalam penelitian terdahulu. Sementara dalam penelitian ini membahas strategi pendidikan politik di Kabupaten Lumajang oleh Bakesbangpol selaku instansi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan politik.

**Ketujuh,** selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “*Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*”, penelitian tersebut ditulis oleh (Ahmad Zain Sarnoto, 2012). Pada penelitian tersebut menjelaskan kebijakan pendidikan sebagaimana tampak pada kebijakan strategis pemerintah di bidang pendidikan. Tentu saja hasil kajian ini harus dapat menghasilkan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat miskin dan kelompok skala kecil. karena itu, banyak sekolah yang kekurangan ruang, bahkan tidak mempunyai gedung yang representatif, atau tidak terdapat ruang pembelajaran sama sekali, dan kebanyakan sekolah yang masih menghadapi kekurangan tenaga pelajar. Terlihat motivasi pendidikan sangat rendah karena gaji yang terbilang jumlahnya kecil. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Zain Sarnoto, 2012) dapat dijadikan acuan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam indikator yang digunakan untuk menganalisis permasalahan strategi pendidikan politik.

**Kedelapan,** penelitian berikutnya berjudul “*Gerakan perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik*” yang ditulis oleh (Roviana, 2014). Penelitian ini

dilakukan mengaplikasikan metode penelitian analisis deskriptif. Dalam penelitian ini menjelaskan gerakan sosial yang dilakukan di Indonesia. Gerakan sosial yang dimaksud adalah religious movement oleh gerakan perempuan NU seperti Muslimat dan Fatayat yang terlibat aktif pada gerakan perpolitikan Indonesia pada saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Roviana, 2014) ini menganalisis gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan NU seperti Muslimat dan Fatayat dalam mentransformasi pendidikan perpolitikan. Sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus kepada bagaimana strategi Bakesbangpol yang telah ditetapkan dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Lumajang.

**Kesembilan,** sebagai bahan bacaan selanjutnya penelitian terdahulu yang diambil berjudul "*Tinjauan Reflektif Media Massa dalam Pendidikan Politik di Indonesia*" yang ditulis oleh (Manik & Suharno, 2019). penelitian ini bermaksud guna mengetahui keberadaan dan fungsi media massa dalam penyaluran pendidikan perpolitikan di Indonesia, khususnya pada masa reformasi. teknik yang diaplikasikan pada penelitian ini merupakan pendekatan induktif dengan metode pengumpulan data survei perpustakaan. Hasil kajian ini mengemukakan bahwa dalam pendidikan perpolitikan di Indonesia peran penting media massa sangat diperlukan. Di negara demokrasi, media massa berperan tidak hanya menjadi penyedia informasi, namun juga sebagai wahana penyampaian perubahan politik di masyarakat. Studi ini juga menjelaskan bahwa dasar persoalan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia terletak pada keberadaan struktur kontrol media yang timpang di Indonesia, yang membuat media lebih rentan mengalami penyimpangan dan bias politik dalam pemberitaannya.

Berdasarkan temuan dalam penelitian terdahulu oleh (Toba sastrawan & Suharno, 2019) terdapat disparitas antara penelitian yang dilaksanakan penulis. Perbedaan pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penerapan strategi penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Lumajang oleh instansi Bakesbangpol, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan media massa sebagai tinjauan reflektif dalam pendidikan politik di Indonesia.

**Kesepuluh,** adapun penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “*Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*” yang ditulis oleh (Payerli Pasaribu, 2017). Dalam penelitian tersebut menjelaskan partai politik sebagai lembaga terorganisir yang keanggotaannya memiliki kesamaan orientasi, nilai, dan cita-cita, dan mendapatkan kekuasaan politik terutama melalui sarana konstitusional untuk menjalankan kebijakan; Tujuannya adalah untuk bersaing memperebutkan posisi politik. Partai politik dapat disebutkan sebagai salah satu prinsip dasar demokratisasi modern. Partai politik mempunyai misi untuk menemukan orang-orang berbakat, membimbing mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas politik sebagai kader partai, dan berpartisipasi dalam perpolitikan. Hal ini menjadi peran utama bagi parpol dalam melaksanakan pembinaan politik kepada masyarakat lokal. Selanjutnya, perbedaan yang terlihat dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada konsep yang digunakan, yakni penulis menjelaskan strategi dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Bakesbangpol, sedangkan pada penelitian terdahulu lebih menjelaskan peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Strategi

Secara etimologi, kata strategi bersumber dari bahasa Yunani, yaitu "strategia", yang berarti ilmu atau seni menjadi seorang pemimpin militer. sehingga strategi dapat dimaknai sebagai taktik untuk mendistribusikan dan menggunakan kekuatan militer di wilayah sasarannya guna meraih tujuan tertentu.

Strategi merupakan ilmu yang merencanakan dan menentukan arah operasional bisnis yang besar serta mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk benar-benar memberikan keuntungan bagi perusahaan. Strategi adalah suatu perencanaan manajemen yang dirancang yang digunakan untuk mengamankan posisi pasar, menarik dan menyenangkan pelanggan, berhasil bersaing, menerapkan prosedur operasional, dan mencapai tujuan organisasi (Suyanto 2007).

Strategi merupakan pengetahuan dan seni untuk mengembangkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap aturan lintas fungsi sehingga membawa pencapaian tujuan suatu organisasi (F. R. David 2004).

Strategi pada umumnya adalah suatu perencanaan manajemen yang dirancang oleh organisasi guna meraih tujuannya. Karena demikian, diantara fokus strategisnya adalah menentukan apakah perusahaan harus bertahan atau tidak. Dengan demikian, penerapan dalam penentuan suatu strategi harus adaptif terkait peluang maupun ancaman dari luar yang mungkin berdampak pada suatu organisasi tersebut (Amirullah 2015).

Slout mengatakan inti dari strategi yaitu bertahan di dunia yang selalu kompetitif, menciptakan persepsi yang baik di benak konsumen, membedakan, mengenali kekuatan

dan kelemahan pesaing, melakukan spesialisasi, Ia menyimpulkan bahwa penting untuk menggunakan kata-kata sederhana. Kepemimpinan yang menentukan arah dan mengetahui realitas pasar dengan memberikan suatu arahan dan kemudian meningkatkannya. berdasarkan definisi tersebut kita memahami strategi adalah sebuah perencanaan yang ditujukan untuk memperoleh suatu tujuan yang dihasilkan (Fahmi 2013).

### 2.2.2 Pendidikan Politik

Dalam bahasa Inggris, pendidikan politik sering diartikan dengan Political Socialization. Supriyadi, menjelaskan istilah “pendidikan politik” dan “sosialisasi politik” mempunyai makna yang mirip ataupun hampir memiliki kesamaan dan dapat diterapkan secara bebas. Alfian juga melanjutkan, dalam arti luas pendidikan politik dapat dikatakan sebagai sosialisasi politik. Lebih lanjut, Alfian mengemukakan makna secara mendalam dari pendidikan politik, yaitu upaya inisiatif untuk merubah prosedur sosialisasi politik di masyarakat dan menanamkan nilai-nilai yang terdapat dalam idealisme sistem politik yang harus dikembangkan (Affandi, Idrus, n.d.).

Pendidikan politik kewarganegaraan merupakan upaya untuk membentuk masyarakat menjadi peserta politik dan subjek politik yang mampu bertanggung jawab secara etis dan moral untuk mencapai tujuan politik (Kartono, 1996:64). Di sisi lain, Rusadi Kanthaprawira (1988) mengartikan pendidikan politik sejalan dengan pengertian kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa masyarakat harus mampu mewujudkan rasa partisipasinya, yang dipandang sebagai upaya untuk memperluas pengetahuan politik masyarakat agar mereka bisa berbuat lebih banyak.

selanjutnya, Kosasih Djahiri menjelaskan bahwa pendidikan perpolitikan merupakan proses pengajaran yang mengajarkan warga negara untuk mengetahui, menghayati, serta mengembangkan rasa kepemilikan yang besar terhadap bangsa, negara, dan keseluruhan struktur lembaga yang ada. secara konstitusional, pendidikan perpolitikan indonesia tercantum dalam Instruksi Presiden tentang Pendidikan politik kaum pemuda No. 12 Tahun 1982. Pendidikan generasi muda pada hakikatnya digambarkan sebagai serangkaian inisiatif untuk membangkitkan dan memperkuat kesadaran politik dan pemerintahan dalam rangka mendukung pelestarian sebagai budaya politik negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Affandi 2011). Pembinaan politik juga menjadi bagian dari proses pembaharuan kehidupan berpolitik negara Indonesia, yang saat ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem perpolitikan yang sangat demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien (Kokotiasa 2012).

Dalam buku Pendidikan Politik (Patricia) dijelaskan beberapa argumen yang mendukung keberadaannya pada awal perkembangan pendidikan politik, antara lain:

1. Dalam bukunya Person to Person, Nicholas Haynes menulis, “Ada kecenderungan dalam ruang lingkup masyarakat untuk percaya bahwa pendidikan seseorang akan membantu seseorang membentuk opininya tentang informasi penting di luar sektor keahliannya” kemudian, sejauh mana mereka yang berpendidikan akan peran besar mereka dalam kehidupan sosial dan politik?.
2. Kenyataan menurut Robert Stradling membuktikan bahwa lulusan sekolah ternyata sama sekali tidak menyadari isu perpolitikan.

3. Robert Dunn memberikan penjelasan bahwa pengajaran perpolitikan di sekolah mempunyai tempat yang selayaknya dalam kurikulum sekolah sebab pelajaran politik menjadi bagian dari persyaratan dasar untuk menjadi warga negara yang baik.

### 2.2.3 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Politik

Secara fungsional pendidikan perpolitikan dapat memberikan kontribusi besar bagi bangsa diantaranya (Kartono, 1996:57):

1. Semakin majunya proses demokrasi bagi seluruh individu (rakyat) dan komunitas/struktur sosialnya.
2. Memiliki prinsip yang lebih manusiawi, berbasis hukum formal, dan pragmatis untuk mendorong modernisasi komunikasi politik.

Selanjutnya, Adapun pendidikan politik bertujuan sebagai berikut (Kartono, 1996:68):

1. Menciptakan masyarakat yang mampu mengetahui kondisi persoalan sosial dan perpolitikan.
2. mampu memberikan kritikan yang membangun terhadap situasi sosial yang kurang stabil.
3. Kegiatannya ditujukan pada individu serta seluruh lembaga sosial maupun negara dengan cara yang demokratis.
4. Mereka bisa memperjuangkan ide-ide dan kepentingan tertentu, terutama yang berkaitan dengan rasa aman dan sejahtera dalam hidup berdampingan.
5. Mendorong peran kemanusiaan setiap personal warga negara dalam pengaktualisasian diri dalam perspektif sosial.

6. Membina seluruh kemampuan dan potensi dalam bidang kognitif, pengetahuan, berpikir kritis, dan kecakapan berpolitik.
7. Memampukan masyarakat berpartisipasi aktif dalam sistem politik demi kepentingan dirinya, masyarakat dan negaranya.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ustman Abdul Mu'iz (2000), bahwa politik bertujuan untuk mendorong pengembangan perilaku dan kesadaran akan perpolitikan.

#### 1. Perilaku Politik

Perilaku politik menjadi tujuan utama dari prosedur pendidikan politik. Perilaku politik dipahami sebagai serangkaian reaksi yang dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Diantara dimensi terpenting yang berkontribusi terhadap mengembangkan perilaku politik adalah:

- a. Sistem perpolitikan ditinjau dalam bentuk dan fungsinya dapat berperan penting dalam menetapkan arah politik seseorang.
- b. Membentuk kemampuan, pengalaman serta relasi diciptakan oleh individual dan entitas tertentu.

#### 2. Kesadaran politik

Menurut Ustman sebagaimana dikutip dalam Peter (2000), kesadaran politik merujuk pada keragaman pengetahuan, tujuan, dan nilai-nilai yang membangun pengetahuan politik individu dalam hubungannya dengan kekuasaan politik. Di sisi lain, Al-Khumasi mengartikan kesadaran politik menjadi sesuatu yang ditanamkan oleh individu, yang mencakup pengetahuan politik terhadap berbagai isu, institusi, dan kepemimpinan politik baik di tingkat lokal ataupun global. Melihat berbagai persepsi tersebut, kita dapat melihat bahwa kesadaran politik meliputi:

- a. Cara pandang yang terbuka dan menyeluruh.
- b. Pemahaman yang kritis
- c. Menjunjung tinggi rasa pertanggungjawaban.
- d. Memberikan perubahan untuk mencapai kebebasan atau mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial.

#### 2.2.4 Bentuk Pendidikan Politik

Tentu saja pendidikan politik tidak dapat diwujudkan jika tidak secara nyata dipraktikkan di tengah lingkungan sosial. Kuntowijoyo (1997:58), menjelaskan terkait bentuk-bentuk pendidikan politik adalah sebagai berikut:

- 1) Secara formal, pendidikan politik dapat dilakukan dengan upaya-upaya doktrinasi.
- 2) Secara non formal, pendidikan politik dapat dilaksanakan dengan aktivitas pembelajaran dan mimbar bebas.